

**PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN
DESA
(Studi Pada Desa Serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten
Karo)**

SKRIPSI

OLEH:

**YAIZZA UMAYYA
(188510046)**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/23

**PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN
DESA**

(Studi Pada Desa Serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

**YAIZZA UMAYYA
188510046**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Kepemimpinan Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa
(Studi Pada Desa Serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo)

Nama Mahasiswa : Yaizza Umayya
NPM : 188510046
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I **Pembimbing II**

Walid Mustafa Sembiring, S.Sos, M.Si **Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP**

Mengetahui:

Dekan **Prodi Pemerintahan**

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si **Dr. Nurul Wafandari, S.ST, M.Si**



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yaizza Umayya
NPM : 188510046
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : ISIPOL
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya saya yang berjudul: **Peran Kepemimpinan Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa, studi pada Desa Serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo**. Dengan hak bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : Mei 2023

nyatakan

METERAI TEMPEL
30AKX308668869
YAIZZA UMAYYA

ABSTRAK

Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena baik buruknya partisipasi masyarakat bergantung dari perilaku pemimpinnya. Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar tercapai hasil yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Serdang berjalan dengan baik sesuai dengan 3 indikator peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi pembangunan desa yaitu melalui indikator motivator mendorong atau memotivasi masyarakat agar terlibat dalam pembangunan fisik dan kegiatan gotong royong, indikator fasilitator bahwa kepala desa sebagai fasilitator selalu memberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang guna seperti halnya tempat pertemuan. Seperti balai desa yang difasilitasi kepala desa guna membahas mengenai pembangunan-pembangunan untuk yang ada di desa Serdang. Indikator mobilisator menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa. Misalnya melakukan kerja bakti, meningkatkan aparatur perangkat desa, dan menggerakkan masyarakat dalam pertemuan desa.

Kata Kunci: *Peran, Kepala desa, Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan*

ABSTRACT

Leadership is a very important factor in influencing community participation, because the good or bad of community participation depends on the behavior of the leader. Leadership is a process of activity to move others by leading, guiding, influencing others, to do something in order to achieve the exoected results. The purpose of this study was to find out how the role of the Village Head Increases Community Participation in Development in Serdang Village, Barusjahe District, Karo Regency. This type of research uses qualitative research and data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. The results showed that community participation in the development of Serdang Village was going well according to 3 indicators of the role of the village head in increasing village development participation, namely through the motivator indicator encouraging or motivating the community to be involved in physical development and mutual cooperation activities, the facilitator indicator that the village head was the facilitator always provide supporting facilities such as meeting places. Like the village hall facilitated by the village head to discuss developments in Serdang village. The mobilizer indicator mobilizes or invites the community to participate together in taking concrete actions to develop the village, for example doing community service, increasing village apparatus and mobilizing the community in village meetings.

Keywords: *Role, Village head, Participation, Community, Development*

RIWAYAT HIDUP

Penulis (Yaizza Umayya) Dilahirkan di Berastagi pada tanggal 13 Februari 2000. Dari pasangan Bapak Anwar Sanjaya dan Ibu Dra.Fauziah Sentiani Br Barus. Penulis merupakan putri ketiga (3) dari empat (4) bersaudara. Penulis Menyelesaikan Pendidikan SD pada tahun 2012 di SD Negeri 047160 Berastagi, menyelesaikan Pendidikan SMP pada tahun 2015 di SMP Negeri 1 Berastagi, menyelesaikan Pendidikan SMA pada tahun 2018 di SMA Negeri 1 Berastagi. dan pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Medan, Mei 2023

Penulis

Yaizza Umayya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan taufiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Strata satu (1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Adapun judul Skripsi ini adalah **"PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (Studi Pada Desa Serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo)"**

Penulis menyadari bahwa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai kepada tahap penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan bimbingan dan bantuan, sehingga dapat terwujudnya skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor

Universitas Medan Area.

2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Ir Siti Mardiana M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr Nadra Ideyani Vita M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Bapak Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Evi Yunita Kurniati, S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Fahrul Azmi, S.Sos, MAP selaku Sekretaris dalam panitia skripsi penulis.
9. Seluruh staf dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.

10. Kedua orang tua penulis, Bapak Alm. Anwar Sanjaya dan Ibu Dra. Fauziah Sentiani Br Barus yang telah membesarkan, menyemangati, menasehati, membimbing, dan mendidik penulis dari kecil hingga saat ini tanpa meminta balas jasa. Serta yang sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan baik materi untuk pendidikan dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dan mendapat gelar S1.
11. TRESIA YASHARA S.Sn , BRAM BEN RIFO A.Md , AZ-ZAHRA ARFA ANJANI ketiga saudara penulis yang telah banyak memberikan semangat dan Motivasi kepada penulis.
12. Seluruh teman kelas Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018, sahabat penulis Imelda, Rifa, Ihda, Nadila, Adinda, yang telah berjuang Bersama-sama menyelesaikan S-1.
13. Bapak Dastanta Barus selaku Kepala Desa Serdang Kec. Barusjahe Kab. Karo.
14. Bapak Alto Belly Sembiring, Bapak Melki Sitepu dan seluruh Perangkat Desa Serdang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, yang telah banyak membantu penulis dalam pengambilan data saat penelitian.
15. Seluruh Teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak berperan dalam memberikan motivasi dan

semangat.

16. Rekan-rekan se-Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, dan masih jauh dari harapan oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, maupun kritikan serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, Mei 2022

Penulis

Yaizza Umayya

188510046

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....

i

KATA PENGANTAR.....

iii

DAFTAR ISI.....

vi

DAFTAR TABEL.....

ix

BAB I.....

1

PENDAHULUAN.....

1

1.1 Latar Belakang.....

1	
4	1.2 Rumusan Masalah.....
4	1.3 Tujuan Penelitian.....
4	1.4 Manfaat Penelitian.....
5	1.4.1 Manfaat Teoritis.....
5	1.4.2 Manfaat Praktis.....
6	BAB II KAJIAN PUSTAKA.....
6	2.1 Konsep dan Teori Peran.....
11	2.2 Konsep dan Teori Kepemimpinan.....
15	2.3 Konsep Desa.....
16	2.3.1 Kepala Desa.....
17	2.4 Kepala Desa dan Peranannya.....
20	2.5 Partisipasi Masyarakat.....
28	2.6 Konsep dan Teori Pembangunan.....
31	2.6.1 Pembangunan Fisik.....
31	2.6.2 Pembangunan Non Fisik.....
32	2.6.3 Pembangunan Desa.....
33	2.7 Kerangka Berfikir.....

2.8 Penelitian Terdahulu.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	38
3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian.....	38
3.1.1 Jenis Penelitian.....	39
3.1.2 Sifat Penelitian.....	39
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	39
3.2 Informan Penelitian.....	40
3.3 Sumber Data Penelitian.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Analisis Data.....	44
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
4.1.1 Kondisi Geografis.....	46
4.2 Keadaan Penduduk Desa Serdang.....	48
4.3 Jenis-jenis Sarana dan Prasarana.....	48
4.3.1 Sarana Kesehatan.....	48
4.3.2 Sarana Pendidikan.....	50

50	4.3.3 Sarana Rumah Ibadah.....
51	4.3.4 Sarana Olahraga.....
51	4.3.5 Sarana Transportasi.....
51	4.3.6 Prasarana Umum Lainnya.....
52	4.4 Kelembagaan Desa.....
53	4.5 Lembaga-Lembaga Masyarakat.....
53	4.6 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Serdang.....
57	4.7 Pembahasan.....
57	4.7.1 Peran Kepala Desa Sebagai Motivator.....
61	4.7.2 Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator.....
62	4.7.3 Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator.....
67	BAB V PENUTUP.....
67	5.1 Kesimpulan.....
68	5.2 Saran.....
69	DAFTAR PUSTAKA.....
71	PEDOMAN WAWANCARA.....
74	LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Berfikir	34
-----------------------------------	----

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	35
--------------------------------------	----

Tabel 4.1 Jenis Sarana Kesehatan.....	49
Tabel 4.2 Jenis Sarana Rumah Ibadah.....	50
Tabel 4.3 Jenis Prasarana Umum lainnya.....	51
Tabel 4.4 Struktur Organisasi Desa Serdang.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No.6 Tahun 2014 di katakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri. Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya.

Kepala desa adalah sebagai administrator pembangunan pada

bidang pemerintahan, administrator pembangunan pada bidang pemerintahan, administrator pada bidang kemasyarakatan, administrator pada bidang ekonomi, administrator pada bidang keamanan dan ketertiban, dan administrator pada bidang-bidang hukum dan adat konsekuensi dari kenyataan tersebut, pemerintah desa (Kepala Desa) harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Keadaan inilah yang terkadang kurang dipahami oleh pemerintah desa sehingga antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi tidak pernah bersentuhan, dengan kata lain antara ketentuan dengan rasa ego yang saling berhadapan.

Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana pemerintah desa (Kepala Desa) sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang terjadi adalah kevakuman. Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No.6 Tahun 2014 "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa". Peraturan Pemerintah tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No.6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkat-perangkat lain dibawahnya, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut agar tercipta asas check and balances yang mendukung demokrasi agar pemerintah desa tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya. Penyelenggaraan pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Hal di atas untuk memperkuat dan mempertegas penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multidimensional.

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam konteks pembangunan, dalam pemerintahan Indonesia

di. canangkan berbagai program diantaranya seperti program inpres desa tertinggal, program pembangunan infra struktur pedesaan, program alokasi dana desa, program PNPM dan sebagainya. Semua program khusus itu bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan.

Dalam kajian ini, penulis mengupas tentang hal-hal yang menjadi permasalahan di dalam pedesaan khususnya desa Serdang terlihat partisipasi masyarakat masih kurang, hal ini disebabkan kurangnya pembinaan dan motivasi kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kurang pedulinya masyarakat terhadap pembangunan desa menganggap pembangunan itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Padahal seharusnya dalam pembangunan masyarakat lebih banyak menyertakan untuk ikut serta, ini dikarenakan masyarakat desa Serdang merupakan petani, dimana mereka pergi pagi ke kebun untuk mengurus tanamannya dan pulang sore sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengurus pembangunan dan menyerahkan semua kepada pemerintah desa. Pembangunan desa seharusnya lebih banyak menyertakan masyarakat untuk ikut serta namun kenyataan yang di dapati di lapangan berbeda dengan apa yang diharapkan. Berdasar pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam judul "Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Desa Serdang, Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo".

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diangkat adalah: Bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Desa terhadap pembangunan desa Serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kepala Desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, hal ini ditekankan mengingat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Serdang masih jauh dari kata maksimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar S1 program studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam

kehidupan berpolitik, khususnya untuk mengembangkan pengetahuan ilmu Pemerintahan. Supaya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Dan agar dapat mengetahui keinginan masyarakat Desa Serdang juga dapat melihat apakah pembangunan yang di laksanakan bisa membawa manfaat kepada masyarakat, sehingga manfaat tersebut bisa di rasakan oleh masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan atau konsep kepada para perangkat desa khususnya dalam pemerintahan dan kepada masyarakat umumnya dalam meningkatkan pengetahuan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Konsep dan Teori Peran

Peran adalah suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan dari jabatan tersebut. setiap manusia dalam kehidupan memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya.

Peran merupakan suatu unsur aspek yang dinamis kedudukan statusnya. Apabila seseorang individu melaksanakan

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan statusnya, dan seseorang itu menjalankan suatu peran (Soekanto Sulistyowati,2017:210-211).

Peranan memiliki dua arti yaitu: setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya atau lingkungannya, Menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan atau amanah yang diberikan masyarakat kepadanya, antara lain:

1. Peranan mencakup norma-norma yang di ungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang yang dilakukan individu itu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dikatakan sebagai prilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Menurut sulistyowati (2017; 211) perihal peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat yang penting sebagai berikut:

1. Peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahakan keberlangsungannya.
2. Peranan tersebut diletakan pada individu yang masyarakat dianggap mampu melaksanakannya, dan harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai keinginan untuk melaksanakannya.

3. Dalam masyarakat terkadang ada individu-individu yang tidak melaksanakan peranannya, peranan sebagai yang diharapkan oleh masyarakat karena pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan pribadi lebih banyak.
4. Apabilah semua orang mampu dan sanggup sanggup melaksanakan perannya. Belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang yang seimbang.
5. Terlihat masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Peran dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang disampaikan dengan kedudukannya dalam masyarakat. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan yang dimilikinya, namun sebaliknya semakin rendah kedudukan seseorang dalam hierarki organisasi, semakin penting keterampilan yang diperlukan. Sementara itu peranan menurut Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa (2003:45) mengatakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Peran merupakan strategi untuk mendapat dukungan dari masyarakat (*public support*).
3. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran digunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan merendam konflik melalui usaha konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.

Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).

4. Peran sebagai terapi. Peran dilakukan sebagai upaya mengobati masalah-masalah psikologi masyarakat seperti halnya ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peranan merupakan suatu rangkaian perilaku yang di timbulkan karena suatu jabatan karena adanya suatu kantor yang dikenal, dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari jabatan yang memiliki tanggung jawab dalam suatu pekerjaan Miftah Thoha (2008:10). Sedangkan peran sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam menangani suatu peristiwa merupakan suatu tingkah laku di masyarakat (Poerwadarminta,2002:751).

Menurut Stephen P Robbins (2003:305) peran ialah seperangkat pola prilaku yang diharapkan dikaitkan pada seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Selain itu peran juga dikatakan sebagai pekerjaan seseorang atau individu, mengandung harapan tertentu tidak memperdulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut. Ia menjalankan perannya sendiri dengan tugas dan fungsinya. (Bryant dan White dalam Santi Marselida Santi,2020:10).

Menurut John M. Inancevich Robert dan Michael T. Matteson, peran meliputi:

1. Peran yang diharapkan (*Expected Role*) yaitu setiap jabatan dalam struktur kelompok memiliki peran yang menentukan perilaku yang diharapkan.
2. Peran yang dipersepsikan (*Perceived Role*) yaitu seperangkat perilaku yang dalam keyakinan seseorang harus ia lakukan karena posisinya.
3. Peran yang dijalankan (*perceived Role*) yaitu perilaku yang benar-benar dijalankan oleh orang tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa peran adalah perilaku atau tindakan seseorang yang memiliki tanggung jawab, dan harus diterapkan di lingkungannya untuk tujuan dan kemajuan bersama. Jika perilaku itu dilakukan untuk diri sendiri maka itu hanya untuk kepentingannya sendiri, namun jika peranan tersebut dijalankan dalam organisasi maka harus memiliki kepentingan Bersama.

Tjokroamidjojo (2000;42) peran Kepemimpinan:

1. Motivator

Motivator merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasi secara kritis, rasional dan

penuh tanggung jawab. Motivasi bisa diberikan dari seorang individu ataupun dari kelompok ke kelompok. Motivasi diberikan pula oleh orang berkedudukan atau statusnya lebih tinggi dan berwibawa. Mereka memiliki unsur-unsur keteladanan dan panutan masyarakat.

2. Fasilitator

Fasilitator adalah seorang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah Bersama-sama. Fasilitator disini adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substansif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan tugas-tugasnya. Fasilitator bukanlah seorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat, arahan atau pendapat. Fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan.

3. Mobilisator

Mobilisator ialah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan Bersama.

Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas dapat dilihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Merton (Raho 2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Dalam pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut, peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya dimasyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

2.2 Konsep dan Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan (*Leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut pengikutnya). Sehingga orang lain tersebut

bertingkah-laku sebagaimana kehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial (Koentjaraningrat, 1967:181). Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai salah satu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat (Soerjono Soekanto, 1990: 318-319).

Menurut C.N. Cooley (1902), *The leader is always the nucleus of tendency, and on the other hand, all social movement, closely examined will be found to consist of tendencies having such nucleus*. Maksudnya, pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat. Bagi setiap lembaga organisasi kepemimpinan yang efektif adalah merupakan kunci keberhasilan. Menurut Wahjosumijo (2003: 83) dalam praktek organisasi kata memimpin mengandung konotasi “menggerakkan, mengarahkan, membina, melindungi, memberi teladan, memberikan dorongan, memberikan bantuan dan sebagainya”. Dari kata tersebut dapat dirumuskan memimpin mengandung makna yang luas yaitu “Kemampuan untuk menggerakkan segala sumber daya yang ada sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dari kata itulah, kemudian muncul istilah kepemimpinan setelah melalui proses yang panjang. Masalah kepemimpinan sama tuanya dengan sejarah manusia. Dalam kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan dan kelebihan tertentu pada manusia. Apakah orang-orang dalam masyarakat atau organisasi tidak dapat menjalankan tugas atau fungsinya tanpa adanya seorang pemimpin? Pemimpin diperlukan, sedikitnya terdapat empat macam alasan: (a) karena banyak orang memerlukan figur pemimpin, (b) dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya, (c) sebagai tempat pengambilan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya dan (d) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan.

Pengertian kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang luar kelompok atau organisasi.

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu sukarela/sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal yaitu: (1) kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut, (2) kepemimpinan melibatkan pen distribusi kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya, (3) adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.

Oleh karena itu, kepemimpinan itu pada hakikatnya adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi, seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama, kepemimpinan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan, melibatkan tiga hal yaitu, pemimpin, pengikut dan situasi tertentu, kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan dan sumber pengaruh dapat secara formal maupun tidak

formal. Konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan kekuasaan pemimpin dalam memperoleh alat untuk memengaruhi perilaku para pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informasi, dan hubungan. Pada dasarnya kemampuan untuk memengaruhi orang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan tersebut ada unsur kekuasaan. Kekuasaan tak lain adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lainnya. Praktik kepemimpinan berkaitan dengan mempengaruhi tingkah laku dan perasaan orang lain baik secara individual maupun kelompok dalam arahan tertentu, sehingga melalui kepemimpinan merujuk pada proses untuk membantu mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-idenya.

Di dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah Saw. wafat menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan amir (yang jamaknya umara) atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin formal.

2.3 Konsep Desa

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus wilayah pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Republik Indonesia”.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dana mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh Negara, desa juga suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa;
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan;
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat Sembilan. (Bastian,2015:6)

2.3.1 Kepala Desa

Saparin dalam Hanif Nurcholis (2011:9) Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, Bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan Kepala Desa yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, oleh karena itu kepala desa mempunyai peran dan juga kedudukan

yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya roda pemerintahan-pemerintahan yang ada di desa.

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kepala desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong-royong masyarakat.

Dengan berbagai kenyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa amatlah berat. Mengingat tugasnya yang berat tersebut maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal menjalankan serta meningkatkan pembangunan bagi masyarakat ia perlu dibantu oleh perangkat desa untuk mengadakan Kerjasama dan koordinasi dengan parat pemerintah yang ada di atasnya dengan aparat lainnya.

2.4 Kepala Desa dan Perananya

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap Desa diluar Desa gineologis yaitu:

Desa yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.

Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan

dari pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan galian c dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Desa pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah peranan Kepala Desa dalam

menjalankan roda Pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang dijalankan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu:

1. Menggerakkan potensi masyarakat;
2. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya;
3. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa;
4. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara

terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

Sebagai prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, oleh karena itu hasilnya pun harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain itu pembangunan Desa tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh segelintir masyarakat dan juga bagaimana peranan Kepala Desa menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan. Hal ini bisa terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan mengevaluasi kembali hasil pembangunan yang telah dicapai di dalam wilayahnya.

2.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikut sertakan, ikut mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004:208). Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001:201-202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R. Tilaar (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah

sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat di tarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

Tumbuhnya interaksi dan komunikasi, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat mengenai (a) kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki, (b) kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri, (c) kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan, (d) adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Ada dua persepsi partisipasi di Indonesia yang berbeda antara persepsi yang diartikan masyarakat dengan yang dipersepsikan pemerintah. Di Indonesia kata ini begitu sering digunakan siapa pun sebagai strategi pembangunan dalam hampir setiap kesempatan, sehingga makna sebenarnya mulai terasa kabur. Para aparat pemerintah

mengartikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung suatu program yang direncanakan dari atas bukan dari rakyat sendiri. Zulkarnain Nasution mengatakan Defenisi tersebut diartikan dngan istila mobilisasi, sedangkan pengertian partisipasi menurut perspektif masyarakat mengandung suatu pengakuan, kreativitas dan inisiatif dari rakyat mdal dasar proses pelaksanaan pembangunan, dengan demikian masyarakat menciptakan pembangunan bukan melalui pendukung pembangunan.

Sutrisno Loekman mengatakan ada dua pengertian partisipasi yakni: pertama, partisipasi adalah dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan perencanaan; kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Menurut Uphoff dkk, (2017:26) mengemukakan pengertian partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hidup mereka. Partisipasi dalam pembangunan desa merupakan satu prasyarat untuk keberhasilan proses pembangunan di pedesaan, namun adanya hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan dalam usaha melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif karena pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (dalam hal ini pemerintah) belum memahami makna sebenarnya dari konsep partisipasi.

Defenisi partisipasi yang berlaku di lingkungan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan tujuannya ditentukan oleh pemerintah. Proyek-proyek pembangunan pedesaan yang berasal dari pemerintah diistilahkan sebagai proyek pembangunan pedesaan yang diutuhkan masyarakat, sedangkan proyek pembangunan yang diusulkan masyarakat dianggap sebagai keinginan, karena itu proyek ini menjadi prioritas yang rendah dari pemerintah. Defenisi inilah yang berlaku secara universal tentang partisipasi.

Oleh karena itu para perencana dan pelaksana pembangunan dalam hal ini pemerintah harus memahami secara benar-benar konsep untuk melahirkan partisipasi masyarakat dari bawah. Agar mencapai hasil-hasil pembangunan yang dapat berkelanjutan, banyak kalangan sepakat suatu partisipasi perlu dilakukan. Pendekatan pembangunan partisipasi harus dimulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan penilaian, disamping bantuan pembangunan.

Ada empat prinsip umum partisipasi pengembangan pedesaan antara lain:

1. Partisipasi tidak boleh dipandang sebagai sebuah program

atau sektor yang terpisah bagi pengembangan pedesaan, namun malah sebagai sebuah pendekatan yang mungkin harus disatukan dalam semua aktivitas.

2. Partisipasi pengembangan pedesaan harus menekankan pada organisasi lokal, yang lebih dapat mendengarkan masukan dari masyarakat desa serta memungkinkan adanya keterlibatan dari masyarakat desa yang lebih banyak dalam berbagai program pengembangan pedesaan.
3. Pembagian aset harus diperhatikan dalam dalam membangkitkan partisipasi, karena semakin tidak merata pembagian maka akan semakin sulit untuk membangkitkan partisipasi secara luas baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam keuntungan.
4. Penekanan yang harus dilakukan untuk membangkitkan partisipasi pengembangan pedesaan bukan pada otonomi lokal saja, tetapi hubungan pusat regional dengan masyarakat lokal dengan syarat-syarat yang disetujui oleh semua pihak saling menguntungkan.

Dari keempat prinsip tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat desa jangan dipandang sebagai sebuah program yang terpisah dari pengembangan pedesaan, menekankan pada organisasi lokal, pembagian aset harus merata dan hubungan pusat regional dengan masyarakat lokal harus disetujui semua pihak dan saling menguntungkan. Untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan pelaksanaan pembangunan ada tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan.

Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi (dalam Irene 2011:58) terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal, disebut partisipasi vertikal karena terjadi bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal adalah masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya, partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi (dalam Dwiningrum, 2015:59) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Partisipasi secara fisik, dimana partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan lainnya.
2. Partisipasi secara non fisik, merupakan partisipasi yang melibatkan

masyarakat alam menentukan tujuannya. Seperti dimana harus menempuh pendidikan nasional dan juga meratanya wawasan maupun keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu dengan cara melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam memberikan arahnya kepada masyarakat yang bersekolah.

Menurut Huraerah (2011:116) menyebutkan ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat yaitu: partisipasi dalam bentuk pikiran, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk harta maupun benda, dalam bentuk keahlian atau keterampilan, dalam bentuk sosial.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya adalah partisipasi dalam bentuk pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga, partisipasi dalam bentuk barang dan partisipasi dalam bentuk uang.

Yadav (UNAPDI, 1980) Dikutip dalam buku Pemberdayaan Masyarakat karya Totok Mardikanto dan Poerwiki Soebiato, 2013, mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantuan dan evaluasi pembangunan, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan Partisipasi masyarakat

dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk sumbangan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.
- c. Partisipasi dalam pemantuan dan evaluasi pembangunan kegiatan pemantuan dan evaluasi program diperlukan bukan hanya agar tujuannya dapat dicapai sesuai harapan namun juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.
- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Dalam suatu kegiatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi

masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, sifat-sifat faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun dapat menghambat keberhasilan suatu program.

Menurut Angel (2011:184) partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi, yaitu:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah keatas dengan keterikatan moral dan nilai masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Pendidikan

Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungan nya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

2.6 Konsep dan Teori Pembangunan

Pembangunan memiliki arti ganda. Makna pertama adalah pembangunan yang lebih memberikan perhatian pada pertumbuhan ekonomi (*economic/growth/economic development*), yang lebih memfokuskan pada jumlah/kuantitas produksi dan penggunaan sumber-

sumber. Keberhasilan pembangunan dari perspektif ini dilihat dari tingginya angka Produk Domestik Bruto (PDB). Makna kedua adalah bahwa pembangunan itu lebih memusatkan perhatian kepada perubahan dalam distribusi barang-barang dalam esensi hubungan sosial. Dalam perspektif ini fokus perhatian adalah pembangunan sosial (*social development*) dimana fokusnya pada perubahan distribusi kualitatif dalam struktur masyarakat melalui penghapusan diskriminasi, eksploitasi, dan penciptaan dan jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dan distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi di antara masyarakat. Prinsipnya adalah bahwa masyarakat harus di beri kesempatan untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri, merumuskan pemecahan masalah dan menerapkan solusi yang mereka pilih (Sudarto P.Haidi,2001).

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha perubahan untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju kearah yang lebih baik, hal ini umumnya dikenal di negara-negara berkembang sebagai suatu proses perubahan sosial yang besar. Menurut siagian, (2006) bahwa proses pelaksanaan rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dari perubahan berencana menuju mudernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Bahwa sesuai dengan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah no 43 tahun 2014, maka desa diwajibkan memiliki perencanaan yang di susun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJMK) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana kerja

pemerintah kampung (RKPK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dari pengertian tersebut terkandung suatu maksud adanya usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui yang sudah ada menjadi lebih baik, baik secara lahiriah maupun secara bathiniah kita ingin menikmati dan mengenyam hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Pembangunan merupakan cakupan yang luas dimana terdapat berbagai hambatan dan bukan dengan cara otomatis berjalan dengan sendirinya. Dalam bidang ekonomi harus ada kesempatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, koperasi dan swasta sebagaimana yang tertera dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan usaha yang baik, diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang menunjang pembangunan dibidang lainnya serta menciptakan lapangan kerja yang luas.

Pembangunan ke seluruh wilayah pada Negara Republik Indonesia maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pembangunan kelurahan yang lebih diarahkan pada perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan mengulangi masalah yang ada. Pembangunan meliputi peningkatan pada kesejahteraan rakyat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis. Dengan demikian pembangunan diprioritaskan pada bidang ekonomi yang harus didukung oleh ketertiban dengan kapasitas hukum, peningkatan

kemampuan dan juga kewibawaan dari pada aparatur negara, pertumbuhan pada kreatifitas dan juga kegairahan kerja, partisipasi masyarakat, keamanan dan ketertiban umum, masalah pajak dan pola hidup sederhana. Dari uraian tersebut di atas, Suryadi (2000: 2) menyebutkan bahwa pembagunan masyarakat desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif masyarakat tetapi apabila inisiatif ini tidak datang maka di pergunakan Teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan respon yang antusias terjamin.

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa hal ini pembagunan itu meliputi pembagunan dalam arti material dan spiritual menyangkut berbagai dimensi hidup dan kehidupan masyarakat desa. Sering orang mengartikan pembangunan adalah sebagai keseluruhan usaha-usaha masyarakat tertentu yang menyangkut bidang fisik saja, misalnya mendirikan gedung, membuat jembatan dan sebagainya. Dan hal ini tidak disalahkan juga tetapi bagi suatu Negara seperti Indonesia, pembangunan di bidang fisik hanyalah merupakan salah satu sisi atau bagian dari pembangunan Nasional. Sebab pembangunan Nasional beda hakekatnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan baik yang menyangkut fisik maupun spiritual. Untuk menghindari adanya penafsiran yang keliru mengenai pembangunan, maka peneliti akan mengemukakan pendapat beberapa ahli antara lain Siagian (2000:2) mengartikan pembangunan ialah sebagai

suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Tjokroamidjojo (2001: 113) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

2.6.1 Pembanguna Fisik

Pembangunan fisik seperti pembahasan semula bahwa pembangunan merupakan realisasi dari suatu perencanaan. Mengulangi arti kata geografi pembangunan, di dalam kata pembangunan atau *development* di kandung unsur-unsur perubahan, tujuan, dan potensi. Unsur perubahan merupakan perubahan dari sesuatu yang kurang menuju kesempurnaan. Unsur tujuan yaitu tujuan yang hendak diarahkan oleh manusia untuk kelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Unsur potensi yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat dan kemudian dapat digunakan untuk membiayai perencanaan berdasarkan uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk merealisasikan unsur-unsur tersebut, maka perlu adanya realisasi yang nyata dalam pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti:

Jalan, Jembatan, Pasar, Pertanian dan Irigasi.

2.6.2 Pembangunan Non Fisik

Di dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak di bidang pengembangan fisik saja tetapi juga harus bergerak di bidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu: Pembangunan manusia, Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan.

2.6.3 Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan dan peningkatan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindarkan masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan tertuntaskan. Pembangunan pedesaan pada umumnya digunakan dalam mewujudkan tindakan yang di ambil dan inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup di lingkungan non-urban, pedesaan, dan desa-desa terpencil. Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai desa yang perlu mendapat perhatian dan segera di antisipasi, di antaranya:

1. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan

professional;

2. Terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal);
3. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif;
4. Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas.

Pembangunan meliputi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan di lanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis. Pembangunan desa adalah pembangunan yang di laksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan di Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong. Adapun pembangunan itu terbagi atas dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

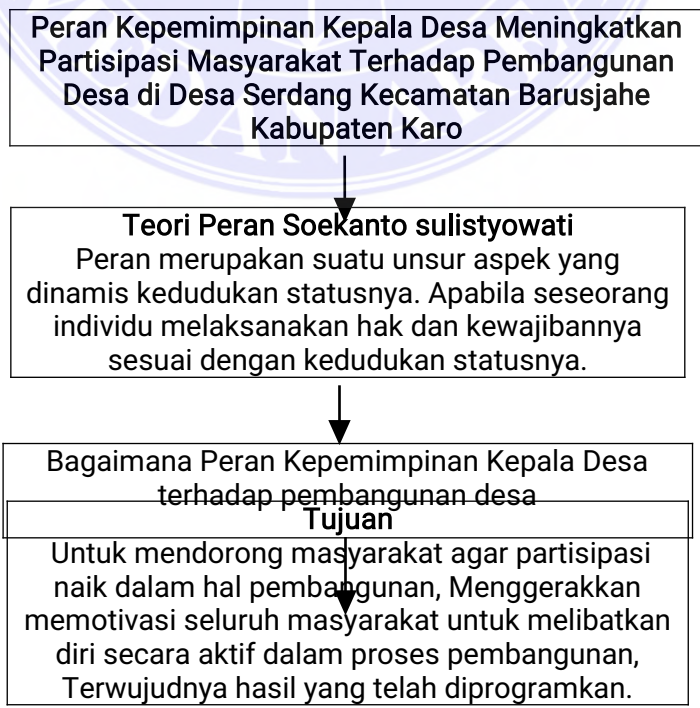
2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan konsep untuk melakukan penelitian untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan diawal, proses pelaksanaan hingga akhir agar hasil dari penelitian tidak bertolak belakang dilapangan. Penelitian ini beragkat dari peraturan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

Kepala desa mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan pembangunan dan masyarakat di desa tersebut sesuai keinginannya. Hubungan sebagai penguasa pemerintah desa, mengkoordinasi pembangunan desa dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Kepala desa berperan sebagai organisator pemerintah di desanya. Kepala desa mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Pembangunan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengolahan pemerintah desa secara keseluruhan dimana kepala desa ikut berperan di dalamnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.



Tabel 2.1 kerangka Berfikir

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Sumber
1.	"Efektifitas Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Samaturue Kabupaten Sinjai"	Kualitatif Deskriptif	Hubungan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa Samaturue lebih bersifat mutualistik masing-masing pihak saling bekerjasama dan memahami perannya dalam pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.	Perbedaan Penelitian terletak pada efektifitas kepemimpinan dan lokasi penelitian.	Skripsi
2.	"Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa (Studi kasus di desa	Kualitatif Deskriptif	Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan desa dinilai masalah kurang	Perbedaan Penelitian terletak pada efektifitas Kepemimpinan dan lokasi Penelitian.	Skripsi

	Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur)" Oleh Muslim (2022)		begitu maksimal baik dilapangan atau ke masyarakat.		
3.	"Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Guna Meningkatkan Pembangunan Desa" Oleh Nico Chariden Sirait (2021)	Kualitatif Deskriptif	Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa berupa pengambilan keputusan, sebagai pusat informasi, pembinaan, dan keterlibatan masyarakat desa.	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi yang dilakukan Nico yang dalam skripsinya memilih lokasi di Desa Sampali Kecamatan Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.	Skripsi
4.	"Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur) Oleh Wayan Ardi Andika (2021)	Deskriptif Kualitatif	Partisipasi masyarakat dalam membangun desanya sudah baik, hal ini terbukti bahwa saat atau Ketika dalam hal keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masih terdapat kekurangan kepala desa yang kurang menggerakkan kepala dusun dalam melaksanakan pembangunan desa dan masyarakat belum mengetahui secara luas penggunaan dana desa untuk program-program pembangunan desa.	Perbedaan penelitian terletak pada Gaya Kepemimpinannya	Skripsi

5.	"Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tradisional Di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng-Bali" oleh Luh Mulyani Dkk.	Kualitatif Deskriptif	Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Julah masih ada yang belum merasa memiliki tanggung jawab untuk sama-sama memajukan desa. Dimana sebuah desa akan dapat maju apabila ada partisipasi dari masyarakat. Selama ini, kepala desa telah berusaha untuk mengakomodir setiap saran dari masyarakat hanya saja belum secara merata.	Perbedaan Penelitian terletak pada lokasi yang dilakukan Luh Mulyani Dkk yang dalam Jurnalnya memilih lokasi di Desa Julah Bali.	Jurnal Ilmiah
----	---	-----------------------	---	--	---------------

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan, dan bukan dari hipotesis yang diukur dengan angka-angka. Dalam

menggunakan metode ini, peneliti menggambarkan suatu keadaan dengan masalah ataupun gejala yang ada di lapangan dengan cara menjelaskan fakta yang berguna untuk mengetahui kejadian dan keadaan dilapangan yang menggambarkan fenomena sosial.

Penelitian kualitatif itu berakar pada latar belakang alamiah sebagai kebutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induksi, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari-dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian (Moleong, 2002 : 27).

3.1.2 Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat pada penelitian yang bersifat deskriptif,

Menurut Usman dan Akbar (2003:4) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat pada populasi tersebut. Penelitian deskriptif bukan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi untuk menggambarkan

keadaan yang realita pada objek penelitian.

Sementara itu, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha memecahkan masalah yang ada berdasarkan data, yang berarti setelah mendapatkan data, menganalisa dan menginterpretasikan menurut Achmadi dan Narbuko (2003:44)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan berdasarkan data dan fakta yang ada. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis pada peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Serdang sehingga mendapatkan kesimpulan peneliti.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada kantor kepala desa Serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang yang ditunjuk dan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai situasi dan juga kondisi yang berkaitan dengan penelitian selama penelitian berlangsung. Informan penelitian hendaklah orang yang benar-benar paham tentang masalah-masalah yang akan di teliti pada penelitian ini. (Moleong,2015:163)

Peneliti menjabarkan 3 (tiga) bagian informan (narasumber) untuk

memberikan informasi seputar topik permasalahan yang peneliti teliti, yakni informasi kunci, informan utama, dan informasi tambahan.

1. Informan Kunci

Mempunyai informasi mengenai penelitian dengan menyeluruh tentang apa-apa saja yang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Informan ini tidak hanya mengetahui tentang kondisi di masyarakat secara garis besar tetapi haruslah memahami tentang informan utama.

Adapun yang menjadi informan kunci didalam penelitian ini ialah Bapak Dastanta Barus, yang merupakan Kepala Desa Serdang.

2. Informan Utama

Seseorang yang dijadikan sebagai sumber data primer dan diminta untuk memberikan gambaran keseluruhan terkait permasalahan yang akan di teliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini yaitu Bapak Alto Belly Sembiring SE, yang merupakan sekertaris kantor desa Serdang.

3. Informan Tambahan

Informan yang memberikan informasi walaupun informan tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Serdang.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dari mana kita diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

- A. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara (responden, informan) dan observasi. Informan adalah sumber data yang berupa orang. Orang yang dalam penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden. Dalam hal ini adalah Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. Dari beberapa informan dapat terungkap kata-kata dari tindakan yang diharapkan tentang kepemimpinan Kepala Desa serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa dan apa hambatannya. Kata kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (Moleong, 2000: 12)
- B. Data Sekunder yaitu data yang diambil dari dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan di masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Dokumen ini ialah setiap bahan tertulis atau film. Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2000: 160).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah aktifitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2010: 137). Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Observasi

Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui secara langsung aktifitas obyek yang sedang diteliti, selain itu observasi ini digunakan juga untuk mengambil data yang terkait dengan peranan kepemimpinan Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga peneliti dalam observasi ini akan mendapatkan data yang akan diolah dan dijadikan kesimpulan mengenai peranan kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa di Desa Serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. Teknik observasi digunakan untuk mengetahui peranan kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa serta dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu kepemimpinan Kepala Desa dalam penentuan arah, strategi dan memotivasi masyarakat serta dalam memobilisasi

sumber sumber pembiayaan kepada masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002: 135). Ada dua macam jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, jawaban telah disiapkan sehingga tinggal mengkategorikan alternatif jawaban yang telah disediakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, jawaban tidak perlu disiapkan sehingga bebas mengemukakan pendapatnya.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan seperti Kepala Desa sehingga peneliti mengetahui tentang kepemimpinan dan hambatan Kepala Desa, wawancara kepada perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa untuk mengetahui lebih jelas mengenai Peranan Kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. Wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang peranan kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan program pembangunan serta pembangunan fisik desa dan pelayanan

kepada masyarakat. Dalam tahap ini wawancara dilakukan terhadap Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, keluarga dan masyarakat Desa Serdang.

c. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi bertujuan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002:2006).

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh fakta mengenai kebenaran yang valid. Karena objek yang menjadi sasaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan dengan fakta yang ada.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data-data dari pemerintahan desa Serdang dan memperoleh arsip-arsip dari kantor desa serta dokumen-dokumen dari desa. Selain itu dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan situasi nyata di tempat observasi dalam penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang ada di Desa Serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, baik itu data penduduk, data sosial budaya, maupun data kondisi daerah. Data yang dikumpulkan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara dan observasi.

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk

menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong, 2004: 3). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan hutan pada masyarakat adat sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

Olehnya itu, dapat dilihat faktor kendala dalam memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan desa yaitu kurangnya peralatan dalam menunjang kelangsungan rapat. tetapi dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian pertemuan dengan staf desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa sudah berjalan cukup baik dimana masyarakat masih ada yang peduli untuk mengikuti rapat tersebut. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Serdang dalam mengatasi kendala tersebut.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tiga indikator yaitu Peran Kepala desa dalam Motivator telah bekerja sama dengan masyarakat dalam hal ini yaitu bersama-sama meningkatkan pembangunan desa dengan cara memberikan dorongan kepada warga, disini dapat dilihat bahwa dorongan dari kepala desa selalu dilakukan dengan tujuan bahwa hal tersebut memberikan kesadaran kepada masyarakat desa khususnya masyarakat desa Serdang akan pentingnya kerja sama dalam sebuah proses pembangunan. Hasil wawancara bahwa kepala desa sebagai Fasilitator selalu memberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang guna seperti halnya tempat pertemuan. Dalam hal ini kepala desa mengundang seluruh masyarakat desa Serdang untuk membahas mengenai pembangunan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan

dari wawancara dengan kepala desa dan pengamatan langsung di lapangan bahwa kepala desa telah berupaya dalam melakukan usaha-usaha pembangunan sektor sarana dan prasarana transportasi(jalan) bagi masyarakat desa Serdang yaitu bapak Indra Ginting, walaupun masih terdapat kekurangan dalam memperbaiki jalan tetapi untuk fasilitas sudah cukup memadai. Peran kepala desa sebagai mobilisator yaitu menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya gotong-royong, memperbaiki tempat umum lainnya.

5.2 SARAN

Setelah adanya kesimpulan maka sebaiknya penulis memberikan saran sebagai berikut:

Sebaiknya dalam setiap kegiatan yang dilakukan, peranan kepala desa dalam menggerakkan usaha-usaha partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah Desa Serdang secara terus menerus melakukan pembinaan melalui pertemuan-pertemuan di desa baik formal maupun informal dengan masyarakat desa. Penyampaian pembinaan-pembinaan tersebut disampaikan pemerintah, masyarakat desa Serdang dapat mungkin lebih meningkatkan interaksi dan komunikasi yang lebih baik guna terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat serta sesama anggota masyarakat Desa Serdang yang ada. Dalam setiap usaha-usaha atau kegiatan-

kegiatan pembangunan perdesaan, kepala desa perlu selalu mensosialisasikannya kepada warganya, agar masyarakat dapat dan mau berpartisipasi dalam pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmadi, Abu, & Narbuko, (2013). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Irawan Soehartono, (2000). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sondang P Siagian, (2016). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, J, & Lexy. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Jurnal

Arif Rahman Hakim, I. S. (2018). Peran kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat. *volume 6, Nomor 3, 2018*, 1112-1123.

BUDIAWAN, A. (2016). PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN JALAN DESA DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN. *Vol 2, No 1*

(2016).

E, P. (2008). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 443-452.

Endah, K. (2018). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Vol 5, No 1 (2018)*, 76-82.

Hendra Mondong, 2014, "*Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*", Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 2.

kartono, k. (1998). *pemimpin dan kepemimpinan*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Prof. DR. Lexy J. Moleong, M. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.

rahmawati. (2019). peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. 7-19.

Selni Paru, M. K. (2019). PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA. *Vol 3, No 3 (2019)*, 7-11.

SUBANDI, E. (2017). PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN DESA (Studi kasus di Kantor Desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban). *Vol. 1 No. 1 (2017): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5-10.

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Vol 7 No 1 (2018): Binamulia Hukum*, 82-95.

WIDAGDO, L. (2006). KEPALA DESA DAN KEPEMIMPINAN.

Skripsi

Galih, A. (2015). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*.

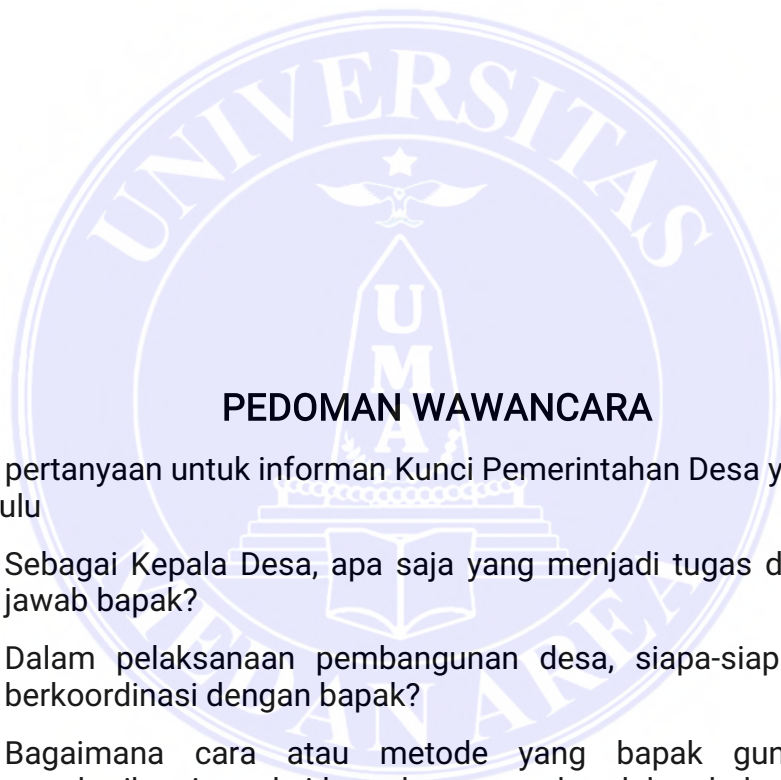
Mayasari, T. (2021). *Peran Pemerintahan Desa Dan Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Atib Ko Ambai Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kabupaten Rokan Hilir Riau*.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2015 tentang desa.

Undang-undang No 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 1 tentang Pemrintahan Desa.



PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk informan Kunci Pemerintahan Desa yaitu Penghulu

1. Sebagai Kepala Desa, apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab bapak?
2. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, siapa-siapa saja yang berkoordinasi dengan bapak?
3. Bagaimana cara atau metode yang bapak gunakan untuk memberikan instruksi kepada masyarakat dalam hal pembangunan desa?
4. Dalam memutuskan suatu pertimbangan menyangkut pembangunan desa. Apakah bapak mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan masyarakat?
5. Menurut bapak, apakah penyusunan program kerja dalam hal pembangunan desa sudah terlaksana dengan baik?
6. Bagaimana cara bapak mengendalikan proses pelaksanaan pembangunan desa?
7. Untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, motivasi apa yang bapak sampaikan kepada masyarakat?

8. Menurut bapak, apakah masyarakat selalu memberikan ide Ketika diadakan rapat pembangunan desa?
9. Menurut bapak, apakah masyarakat selalu hadir dalam rapat pembangunan desa?
10. Menurut bapak, sumbangan apakah yang sering diberikan masyarakat apabila ada kutipan-kutipan dari desa?

Daftar pertanyaan untuk informan utama yaitu sekretaris desa.

1. Sebagai sekretaris desa, apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab bapak?
2. Menurut bapak, apakah kepala desa sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik?
3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai cara atau metode yang digunakan kepala desa dalam memberikan intruksi kepada masyarakat dalam hal pembangunan desa.
4. Bagaimana tanggapan bapak terhadap komunikasi kepala desa dengan masyarakat dalam memutuskan suatu pertimbangan menyangkut pembangunan desa?
5. Bagaimana tanggapan bapak terhadap komunikasi kepala desa dalam proses pelaksanaan pembangunan desa?
6. Bagaimana menurut pendapat bapak, tentang cara kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
7. Bagaimana menurut bapak, apakah penyusunan program kerja dalam hal pembangunan desa sudah terlaksana dengan baik?
8. Menurut bapak, apakah masyarakat selalu memberikan ide Ketika diadakan rapat pembangunan desa?
9. Menurut bapak, apakah masyarakat selalu hadir dalam rapat pembangunan desa?
10. Menurut bapak, sumbangan seperti apakah yang sering di berikan masyarakat apabila ada kutipan-kutipan dari desa?

Daftar pertanyaan untuk informan tambahan yaitu Masyarakat

1. Menurut bapak, apakah kepala desa sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik?
2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pemberian tanggungjawab dari kepala desa kepada masyarakat dalam hal pembangunan desa?

3. Bagaimana tanggapan bapak, mengenai cara atau metode yang digunakan kepala desa dalam memberikan intruksi kepada masyarakat dalam hal pembangunan desa?
4. Bagaimana tanggapan bapak terhadap komunikasi kepala desa dengan masyarakat dalam memutuskan suatu pertimbangan menyangkut pembangunan desa?
5. Bagaimana tanggapan bapak tentang pengendalian kepala desa dalam proses pelaksanaan pembangunan desa?
6. Bagaimana menurut bapak tentang cara kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
7. Menurut bapak, apakah penyusunan program kerja dalam hal pembangunan desa sudah terlaksana dengan baik?
8. Menurut bapak, apakah masyarakat selalu memberikan ide Ketika diadakan rapat pembangunan desa?
9. Menurut bapak, apakah masyarakat selalu hadir dalam rapat pembangunan desa?
10. Menurut bapak, sumbangan seperti apakah yang sering diberikan masyarakat apabila ada kegiatan-kegiatan dari desa?

LAMPIRAN



Wawancara dengan informan kunci
(Bapak Dastanta Barus (18 Februari 2022))



Wawancara dengan Informan Utama
(Bapak Beniwan Barus (20 Februari 2022))



Wawancara dengan Informan Tambahan
Ibu Sinta Br Ginting (23 Februari 2022)



Wawancara dengan informan tambahan
Bapak Gembira Barus (23 Februari 2022)